



## **BUPATI SOLOK**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa dinamisnya penyelenggaraan Pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat menyebabkan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu untuk melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK  
dan  
BUPATI SOLOK  
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.262.524.496.560,55 berkurang sejumlah Rp.69.174.946.344,32 sehingga menjadi Rp.1.193.349.550.216,23 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. Semula	Rp.	1.232.524.496.560,55	
2. (Berkurang)	Rp.	(80.996.847.075,00)	
Jumlah Pendapatan	Setelah Rp.	1.151.527.649.485,55	
Perubahan			
b. Belanja Daerah			
1. Semula	Rp.	1.262.524.496.560,55	
2. (Berkurang)	Rp.	(69.174.946.344,32)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.193.349.550.216,23	
Defisit setelah perubahan	Rp.	(41.821.900.730,68)	
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
b) Bertambah	Rp.	11.821.900.730,68	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp.	41.821.900.730,68	
setelah Perubahan			
2. Pengeluaran Pembiayaan			
a) Semula	Rp.	0,00	
b) Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	
setelah Perubahan			
Jumlah Pembiayaan Netto setelah	Rp.	41.821.900.730,68	
Perubahan			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00	
Tahun Berkenaan			

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1. Semula	Rp.	75.296.758.345,55	
2. Bertambah	Rp.	999.035.251,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp.	76.295.793.596,55	
setelah Perubahan			
b. Dana Perimbangan			
1. Semula	Rp.	972.973.643.215,00	
2. (Berkurang)	Rp.	(92.438.433.215,00)	
Jumlah Dana Perimbangan setelah	Rp.	880.535.210.000,00	
Perubahan			
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1. Semula	Rp.	184.254.095.000,00	
2. Bertambah	Rp.	10.442.550.889,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan	Rp.	194.696.645.889,00	
Daerah Yang Sah setelah			
Perubahan			

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	19.127.935.803,55
2. (Berkurang)	Rp.	(507.664.092,00)
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.	18.620.271.711,55

b. Hasil Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	10.679.955.435,00
2. (Berkurang)	Rp.	(1.169.340.852,00)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.	9.510.614.583,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.044.383.899,00
2. Bertambah	Rp.	1.176.040.195,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	7.220.424.094,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	39.444.483.208,00
2. Bertambah	Rp.	1.500.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.	40.944.483.208,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	12.302.731.215,00
2. Bertambah	Rp.	503.675.785,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.	12.806.407.000,00

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1. Semula	Rp.	737.805.913.000,00
2. (Berkurang)	Rp.	(69.562.654.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah Perubahan	Rp.	668.243.259.000,00

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Semula	Rp.	222.864.999.000,00
2. (Berkurang)	Rp.	(23.379.455.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Perubahan	Rp.	199.485.544.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	50.922.000.000,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	50.922.000.000,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	45.535.567.000,000
2. (Berkurang)	Rp.	(59.930.111,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp.	45.475.636.889,00

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	87.796.528.000,00
2. Bertambah	Rp.	10.502.481.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp.	98.299.009.000,00

**Pasal 3**

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	838.937.695.018,55
2. (Berkurang)	Rp.	(13.273.989.652,08)
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	825.663.705.366,47

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	423.586.801.542,00
2. (Berkurang)	Rp.	(55.900.956.692,24)
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	367.685.844.849,76

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	626.233.696.584,07
2. (Berkurang)	Rp.	(34.708.414.050,58)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	591.525.282.533,49

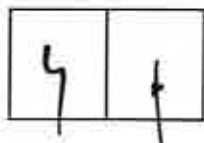
b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	52.693.640.000,00
2. (Berkurang)	Rp.	(2.341.500.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	50.352.140.000,00

c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp.	3.529.704.374,86
2. Bertambah	Rp.	1.860.825.928,50
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	5.390.530.303,36
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
1. Semula	Rp.	153.980.654.059,62
2. (Berkurang)	Rp.	(7.646.241.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	146.334.412.559,62
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	29.561.339.970,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	32.061.339.970,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	42.538.130.535,00
2. Bertambah	Rp.	124.745.270,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	42.662.875.805,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	233.413.783.948,00
2. (Berkurang)	Rp.	(26.912.852.063,24)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	206.500.931.884,76
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	147.634.887.059,00
2. (Berkurang)	Rp.	(29.112.849.899,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	118.522.037.160,00



**Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	11.821.900.730,68
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	41.821.900.730,68

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp.	30.000.000.000,00
2. Bertambah	Rp.	11.821.900.730,68
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	41.821.900.730,68

- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah

1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Perubahan Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar pinjaman dan obligasi daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 7**

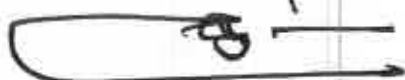
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 13 Oktober 2020  
BUPATI SOLOK

  
GUSMAL

Diundangkan di Arosuka  
pada tanggal 13 Oktober 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SOLOK,



ASWIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT :  
(4/75/2020).

## DAFTAR ISI

KODE REK	UNIT ORGANISASI	HALAMAN
1	2	3
	Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD	1 - 1
	Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD	2 - 6
	Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan	
1.01.01.01.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7 - 13
1.01.02.01.	Dinas Kesehatan	14 - 21
1.01.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22 - 27
1.01.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	28 - 31
1.01.05.01.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	32 - 34
1.01.05.02.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 - 37
1.01.06.01.	Dinas Sosial	38 - 41
1.02.01.01.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	42 - 46
1.02.05.01.	Dinas Lingkungan Hidup	47 - 50
1.02.06.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	51 - 54
1.02.07.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	55 - 58
1.02.08.01.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan	59 - 63
1.02.09.01.	Dinas Perhubungan	64 - 66
1.02.10.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	67 - 71
1.02.11.01.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	72 - 76
1.02.18.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	77 - 80
2.00.01.01.	Dinas Perikanan dan Pangan	81 - 85
2.00.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	86 - 89
2.00.03.01.	Dinas Pertanian	90 - 95
3.00.01.01.	Inspektorat Daerah	96 - 98
3.00.02.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	99 - 103
3.00.03.00.	PPKD	104 - 105
3.00.03.02.	Badan Keuangan Daerah	106 - 112
3.00.04.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	113 - 117
4.00.01.01.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	118 - 118
4.00.01.02.	Sekretariat Daerah	119 - 126
4.00.02.01.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	127 - 127
4.00.02.02.	Sekretariat DPRD	128 - 132
5.00.01.01.	Kecamatan Pantai Cermin	133 - 135
5.00.01.02.	Kecamatan Lembah Gumanti	136 - 139
5.00.01.03.	Kecamatan Payung Sekaki	140 - 143
5.00.01.04.	Kecamatan Lembang Jaya	144 - 146
5.00.01.05.	Kecamatan Gunung Talang	147 - 150
5.00.01.06.	Kecamatan Bukit Sundi	151 - 153
5.00.01.07.	Kecamatan IX Koto Sungai Lasi	154 - 156
5.00.01.08.	Kecamatan Kubung	157 - 160
5.00.01.09.	Kecamatan X Koto Singkarak	161 - 164
5.00.01.10.	Kecamatan X Koto Diatas	165 - 167
5.00.01.11.	Kecamatan Junjung Sirih	168 - 171
5.00.01.12.	Kecamatan Hiliran Gumanti	172 - 174
5.00.01.13.	Kecamatan Tigo Lurah	175 - 177
5.00.01.14.	Kecamatan Danau Kembar	178 - 181
6.00.01.01.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	182 - 185
	Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan	186 - 288
	Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Negara	289 - 290
	Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan	291 - 291
	Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah	292 - 292
	Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	293 - 293
	Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah	294 - 294
	Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Aset Lain-Lain	295 - 295
	Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini	296 - 297
	Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah dan	298 - 298
	Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	299 - 299

**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK**  
**RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman : 1

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.232.524.496.560,55	1.151.527.649.485,55	(80.996.847.075,00)	(6,57)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75.296.758.345,55	76.295.793.596,55	999.035.251,00	1,33
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	19.127.935.803,55	18.620.271.711,55	(507.664.092,00)	(2,65)
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	10.679.955.435,00	9.510.614.583,00	(1.169.340.852,00)	(10,95)
4.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	6.044.383.889,00	7.220.424.094,00	1.176.040.195,00	19,46
4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	39.444.483.208,00	40.944.483.208,00	1.500.000.000,00	3,80
4.2.	DANA PERIMBANGAN	972.973.643.215,00	880.535.210.000,00	(92.438.433.215,00)	(9,50)
4.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	12.302.731.215,00	12.806.407.000,00	503.675.785,00	4,09
4.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	737.805.913.000,00	668.243.259.000,00	(69.562.654.000,00)	(9,43)
4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	222.864.999.000,00	199.485.544.000,00	(23.379.455.000,00)	(10,49)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	184.254.085.000,00	194.696.645.889,00	10.442.560.889,00	5,67
4.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	50.922.000.000,00	50.922.000.000,00		
4.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	45.535.587.000,00	45.475.636.889,00	(59.930.111,00)	(0,13)
4.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	87.796.528.000,00	98.299.009.000,00	10.502.481.000,00	11,96
	JUMLAH PENDAPATAN	1.232.524.496.560,55	1.151.527.649.485,55	(80.996.847.075,00)	(6,57)
5.	BELANJA DAERAH	1.262.524.496.560,55	1.193.349.550.216,23	(69.174.946.344,32)	(5,48)
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	838.937.695.018,55	825.683.705.366,47	(13.273.989.652,08)	(1,58)
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	626.233.896.584,07	591.525.282.533,49	(34.708.414.050,58)	(5,54)
5.1.4.	BELANJA HIBAH	52.693.640.000,00	50.352.140.000,00	(2.341.500.000,00)	(4,44)
5.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	3.529.704.374,86	5.390.530.303,36	1.860.825.928,50	52,72
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	153.980.654.059,62	146.334.412.559,62	(7.646.241.500,00)	(4,97)
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	32.061.339.970,00	29.561.339.970,00	1.182,45
5.2.	BELANJA LANGSUNG	423.586.801.542,00	367.686.844.849,76	(55.900.956.692,24)	(13,20)
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	42.538.130.535,00	42.662.875.805,00	124.745.270,00	0,29
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	233.413.783.948,00	206.500.931.884,76	(26.912.852.063,24)	(11,53)
5.2.3.	BELANJA MODAL	147.634.887.059,00	118.522.037.160,00	(29.112.849.899,00)	(19,72)
	JUMLAH BELANJA	1.262.524.496.560,55	1.193.349.550.216,23	(69.174.946.344,32)	(5,48)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.000.000.000,00)	(41.821.900.730,68)	(11.821.900.730,68)	39,41
6.	PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
6.1.1.	SILPA TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
	PEMBIAYAAN NETO	30.000.000.000,00	41.821.900.730,68	11.821.900.730,68	39,41
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				

BUPATI SOLOK

GUSMAL

1	2	3	4	5=4-3	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+11	13=12-9	14
4.00.03.11.	KECAMATAN JUNJUNG SIRIH	10.500.000,00	10.500.000,00			412.615.000,00	512.026.632,00	924.643.632,00	383.165.000,00	249.316.644,00	532.483.644,00	(292.159.988,00)	31.600
4.00.03.12.	KECAMATAN HILIRAN GUMANTI	7.500.000,00	7.500.000,00			418.225.000,00	479.111.486,00	897.336.486,00	359.025.000,00	235.696.558,00	594.911.559,00	(302.424.939,00)	33.700
4.00.03.13.	KECAMATAN TIGO LURAH	6.000.000,00	6.000.000,00			429.210.000,00	548.344.597,00	977.554.597,00	413.180.000,00	283.116.511,00	706.296.511,00	(271.258.086,00)	27.750
4.00.03.14.	KECAMATAN DANAU KEMBAR	5.000.000,00	5.000.000,00			376.550.000,00	483.258.147,00	859.808.147,00	368.050.000,00	236.183.614,00	604.233.614,00	(255.574.533,00)	26.720
4.00.04.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI					1.131.807.043,00		1.131.807.043,00	1.047.732.695,00		1.047.732.695,00	(84.074.348,00)	17.430
4.00.04.01.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.131.807.043,00	3.803.376.111,00	4.935.183.154,00	1.047.732.695,00	3.700.037.252,00	4.747.769.947,00	(107.413.207,00)	13.800
	JUMLAH	1.232.524.494.560,55	1.151.527.649.465,55	2.394.052.149.046,10	(6,57)	838.937.695.016,55	796.395.912.306,00	1.675.333.607.324,55	825.683.705.306,47	367.685.644.849,76	1.193.349.550.216,23	(381.994.057.108,32)	24.250


Kode	Uraian	Pembiayaan			SILPA TAB Netto
		Penerimaan	Pengeluaran	Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6
3.00.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	41.821.900.730,68	-	41.821.900.730,68	-
3.00.03.	KEUANGAN	41.821.900.730,68	-	41.821.900.730,68	-
3.00.03.00.	PPKD	41.821.900.730,68	-	41.821.900.730,68	-

BUPATI SOLOK

  
GUSMAL

4.00.04.01. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.00.04.04.17.15.	PEMBERDAYAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	23.502.000,00	-	(23.502.000,00)	(100,00)	
4.00.04.4.00.04.17.15.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	23.502.000,00	-	(23.502.000,00)	(100,00)	
4.00.04.04.17.16.	PEMBERDAYAAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN	35.607.500,00	350.000,00	(35.257.500,00)	(99,02)	
4.00.04.4.00.04.17.16.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	35.607.500,00	350.000,00	(35.257.500,00)	(99,02)	
4.00.04.04.17.17.	MONITORING TERPADU PENANGANAN KONFLIK	62.492.500,00	15.650.000,00	(46.842.500,00)	(74,96)	
4.00.04.4.00.04.17.17.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.492.500,00	15.650.000,00	(46.842.500,00)	(74,96)	
4.00.04.04.21.	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT	2.310.551.200,00	2.301.251.000,00	(9.300.200,00)	(0,40)	
4.00.04.04.21.03.	KOORDINASI FORUM FORUM DISKUSI POLITIK	2.135.540.400,00	2.167.898.000,00	32.357.600,00	1,52	
4.00.04.4.00.04.21.03.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	1.938.806.400,00	2.010.806.400,00	72.000.000,00	3,71	
4.00.04.4.00.04.21.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	196.734.000,00	157.091.600,00	(39.642.400,00)	(20,15)	
4.00.04.04.21.06.	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	76.435.000,00	127.500.000,00	51.065.000,00	66,81	
4.00.04.4.00.04.21.05.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	76.435.000,00	127.500.000,00	51.065.000,00	66,81	
4.00.04.04.21.08.	DUKUNGAN KELANCARAN ADMINISTRASI BAGI PARTAI POLITIK	62.054.100,00	3.128.000,00	(58.926.100,00)	(94,96)	
4.00.04.4.00.04.21.08.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	62.054.100,00	3.128.000,00	(58.926.100,00)	(94,96)	
4.00.04.04.21.09.	SOSIALISASI UNDANG UNDANG PEMILU BAGI APARATUR, ORKEMAS DAN PARPOL	36.521.700,00	2.725.000,00	(33.796.700,00)	(92,54)	
4.00.04.4.00.04.21.09.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	36.521.700,00	2.725.000,00	(33.796.700,00)	(92,54)	
.	JUMLAH BELANJA	4.935.183.154,00	4.747.768.947,00	(187.413.207,00)	(3,80)	
.	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.935.183.154,00)	(4.747.768.947,00)	187.413.207,00	(3,80)	

BUPATI SOLOK  
  
 GUSMAL

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan				Bertambah/ (Berkurang)	
		Jenis Belanja			Jumlah	Jumlah	Jenis Belanja			Jumlah	(Rp)	%
		Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=10-5	12	
4.00.4.00.04.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.806.400,00	10.620.000,00		59.426.400,00	48.806.400,00	5.110.400,00		53.916.800,00	(5.509.600,00)	(9,27)	
4.00.4.00.04.01.06.09.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48.806.400,00	10.620.000,00		59.426.400,00	48.806.400,00	5.110.400,00		53.916.800,00	(5.509.600,00)	(9,27)	
JUNILAH		42.536.130.535,00	233.413.783.948,00	147.634.887.059,00	423.586.801.542,00	42.562.875.805,00	206.500.931.884,76	118.522.037.160,00	367.685.844.849,76	(55.900.986.682,24)	-13,20	

BUPATI SOLOK



GUSMAL

1	2	3	4	5=4-3	6
08.2.00.02.	PARIWISATA	6.210.387.091,00	4.628.688.411,00	(1.581.698.680,00)	(25,47)
09.	Agama	-	-	-	-
10.	Pendidikan	84.615.929.329,00	77.708.904.563,00	(6.907.024.766,00)	(8,16)
10.1.01.01.	PENDIDIKAN	83.587.245.329,00	77.240.249.839,00	(6.346.995.490,00)	(7,59)
10.1.02.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1.028.684.000,00	468.654.724,00	(560.029.276,00)	(54,44)
11.	Perlindungan Sosial	5.956.678.030,00	5.842.900.152,60	(113.777.877,40)	(1,91)
11.1.01.06.	SOSIAL	2.280.174.302,00	2.961.071.576,00	680.897.274,00	29,86
11.1.02.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	498.680.000,00	206.645.624,00	(292.034.376,00)	(58,56)
11.1.02.06.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	3.177.823.728,00	2.675.182.952,60	(502.640.775,40)	(15,82)
JUMLAH		423.586.801.542,00	367.685.844.849,76	(55.900.956.692,24)	(13,20)

BUPATI SOLOK

GUSMAL

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK**  
NOMOR : 4 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

**KABUPATEN SOLOK**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Halaman : 291

GOLONGAN/RUANG	PEGAWAI
Gol. IV	1565
Gol. III	3051
Gol. II	763
Gol. I	26
Lainnya	2
<b>JUMLAH</b>	<b>5407</b>

BUPATI SOLOK



GUSMAL

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
 NOMOR : 4 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

KABUPATEN SOLOK  
 DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 292					
NO	Uraian Rincian Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Daerah	21.746.629.964,00	1.872.642.487,00	1.045.374.743,00	22.573.897.708,00
2	Penyisihan Piutang Pajak daerah	(17.456.902.770,45)	(76.717.092,69)	-	(17.533.619.863,14)
3	Piutang Retribusi Daerah	395.220.400,00	474.057.800,00	316.018.000,00	553.260.200,00
4	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(66.816.200,00)	(59.791.980,00)	-	(126.608.180,00)
5	Piutang Lainnya	11.902.400.135,62	9.684.153.792,00	9.338.003.236,29	12.248.550.691,33
6	Penyisihan Piutang Lainnya	(2.654.421.842,56)	-	75.915.647,93	(2.730.337.490,49)
- 7	Piutang Transfer	-	2.573.881.635,00	-	2.573.881.635,00
8	Penyisihan Piutang Transfer	-	(12.869.408,18)	-	(12.869.408,18)
9	Belanja Dibayar Dimuka	170.347.906,84	280.152.293,15	170.347.906,84	280.152.293,15
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.036.457.593,45</b>	<b>14.735.509.526,28</b>	<b>10.945.659.534,06</b>	<b>17.826.307.585,67</b>

BUPATI SOLOK,  
  
 GUSMAL

KABUPATEN SOLOK  
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 293

NO	No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Plhak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai dengan Tahun Ini	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai akhir tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal (Investasi) yang diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9-7+8	10-6-9	11	12	13-9+12
1	1	2001	BPD (Bank Nagari)			1.562.900.000,00	1.562.900.000,00		1.562.900.000,00				1.562.900.000,00
		2001	BPD (Bank Nagari)			566.073.000,00	566.073.000,00		566.073.000,00				566.073.000,00
		2003	BPD (Bank Nagari)			625.000.000,00	625.000.000,00		625.000.000,00				625.000.000,00
		2003	BPD (Bank Nagari)			250.000.000,00	250.000.000,00		250.000.000,00				250.000.000,00
		2003	BPD (Bank Nagari)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				2.000.000.000,00
		2004	BPD (Bank Nagari)			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00				1.000.000.000,00
		2004	BPD (Bank Nagari)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				2.000.000.000,00
2	2	2003	Solinda			2.322.235.246,00	2.322.235.246,00		2.322.235.246,00				2.322.235.246,00
3	3	2003	PDAM			404.177.998,00	404.177.998,00		404.177.998,00				404.177.998,00
4	4	2006	BPD (Bank Nagari)			2.000.000.000,00	2.000.000.000,00		2.000.000.000,00				2.000.000.000,00
5	5	2006	BPR										
6	6	2008	BPD (Bank Nagari)			1.001.000.000,00	1.001.000.000,00		1.001.000.000,00				1.001.000.000,00
7	7	2008	BPD (Bank Nagari)			179.334.566,33	179.334.566,33		179.334.566,33				179.334.566,33
8	8	2010	Revolving PZKU			230.800.000,00	230.800.000,00		230.800.000,00				230.800.000,00
9	9		Penyisihan Revolving PZKU			(230.800.000,00)	(230.800.000,00)		(230.800.000,00)				(230.800.000,00)
10	10	2011	BPD (Bank Nagari)			1.769.692.434,00	1.769.692.434,00		1.769.692.434,00				1.769.692.434,00
11	11	2012	BPD (Bank Nagari)			3.811.000.000,00	3.811.000.000,00		3.811.000.000,00				3.811.000.000,00
12	12	2012	PDAM			11.119.173.165,41	11.119.173.165,41		11.119.173.165,41				11.119.173.165,41
13	13	2013	PT. Balaung Citrajaya Sumbang			2.824.899.000,00	2.824.899.000,00		2.824.899.000,00				2.824.899.000,00
14	14	2013	BPD (Bank Nagari)			6.323.000.000,00	6.323.000.000,00		6.323.000.000,00				6.323.000.000,00
15	15	2014	BPD (Bank Nagari)			7.369.999.999,67	7.369.999.999,67		7.369.999.999,67				7.369.999.999,67
16	16	2015	PDAM			10.980.353.952,68	10.980.353.952,68		10.980.353.952,68				10.980.353.952,68
17	17	2015	BPD (Bank Nagari)			4.539.550.000,00	4.539.550.000,00		4.539.550.000,00				4.539.550.000,00
18	18	2016	PDAM			4.758.507.170,00	4.758.507.170,00		4.758.507.170,00				4.758.507.170,00
19	19	2016	BPD (Bank Nagari)			5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00				5.000.000.000,00
20	20	2017	PDAM			4.137.000.000,00	4.137.000.000,00		4.137.000.000,00				4.137.000.000,00
21	21	2017	BPD (Bank Nagari)			4.999.450.000,00	4.999.450.000,00		4.999.450.000,00				4.999.450.000,00
22	22	2018	PDAM					1.500.000.000,00	1.500.000.000,00				1.500.000.000,00
23	23	2019	Penyertaan Rugi PDAM										
						81.543.346.532,09	81.543.346.532,09	1.500.000.000,00	83.043.346.532,09	-	[150.995.999,28]	-	82.892.350.532,81


BUPATI SOLOK  
  
GUSMAL

KABUPATEN SOLOK  
 DAFTAR PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 294

NO	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	278.847.929,042,36	2.778.827.560,36	2.145.586.698,36	279.481.169.904,36
2	Peralatan dan Mesin	245.837.917.616,36	38.106.037.932,34	5.206.460.752,65	278.737.494.796,05
3	Gedung dan Bangunan	634.219.879.096,75	72.442.240.902,22	42.645.395.451,13	664.016.724.547,84
4	Jalan,Irigasi,dan Jaringan	776.303.802.690,66	123.588.007.931,71	23.437.552.565,91	876.454.258.056,46
5	Aset Tetap Lainnya	275.540.520.849	45.796.954.745,28	51.832.491.474,74	269.504.984.119,71
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	22.460.537.728,87	36.415.446.463,79	4.972.104.824,00	53.903.879.368,66
7	Akumulasi Penyusutan	(793.728.122.336)	(119.591.695.418,51)	-	(913.319.817.754,300)
	Jumlah	1.439.482.464.688,38	199.535.820.117,19	130.239.591.766,79	1.508.778.693.038,78

BUPATI SOLOK



GUSMAL

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  
 NOMOR : 4 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 18 OKTOBER 2020

KABUPATEN SOLOK  
 DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 295

No	URAIAN	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Aset Tidak Berwujud	5.000.000,00	119.780.000,00		124.780.000,00
2	Aset Rusak Berat	72.141.053.235,26	2.914.134.167,00	12.861.846.728,00	62.193.340.674,26
3	Tuntutan Ganti Rugi	1.244.260.353,43	278.525.452,00	8.131.234,32	1.514.654.571,11
4	Aset Lain-Lain	39.717.026.411,81	6.124.172.320,00	35.117.662.387,92	10.723.536.343,89
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	(32.445.000,00)	-	(32.445.000,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Kondisi Rusak Berat	-	(38.557.647.567,51)	-	(38.557.647.567,51)
	Jumlah	113.107.340.000,50	(29.153.480.628,51)	47.987.640.350,24	35.966.219.021,75

BUPATI SOLOK



GUSMAL



KABUPATEN SOLOK  
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

Halaman : 298

NO	Tujuan Pembentukan dana cadangan	Dasar Hukum Pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Umum Daerah (Rp)	Transfer Ke Kas Umum Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUPATI SOLOK,

  
GUSMAL

## LAMPTIRAN XIII

## KABUPATEN SOLOK

Halalnamam - 299

[illegible]

**BUPATI SOLOK,**

**GÜŞMAL**